

**KORELASI KONSEP *HAJI* DALAM PERISTIWA PENGUNDURAN DIRI
PEJABAT PEMERINTAH JEPANG
(Studi Kasus Pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Ryu Matsumoto)**

Aditia Rahman

Program Studi Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga

Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286

E-mail : ndomberos-unos@yahoo.com

Abstrak

Pengunduran diri banyak dilakukan oleh pejabat pemerintah Jepang. Pelaku pengunduran diri tidak hanya dilakukan oleh Perdana Menteri, tetapi juga dilakukan oleh Menteri Kabinet. Latar belakang masalah yang mendasari pengunduran diri ada dua; yaitu masalah pribadi dan masalah dalam negeri Jepang yang ada hubungannya dengan karir pejabat tersebut. Salah satu latar belakang budaya yang mendorong terjadinya pengunduran diri adalah budaya malu (*haji*). *Haji* dapat muncul karena adanya perhatian khusus dari pihak lain. Kasus pengunduran diri Ryu Matsumoto (5 Juli 2012) memiliki indikasi dilatar belakangi oleh *haji*. Namun, selain budaya malu (*haji*), terdapat pula unsur-unsur lain dalam budaya tradisional Jepang yang mengatur pola kehidupan masyarakat. Penelitian ini mempelajari latar belakang karir politik dan proses pengunduran diri Ryu Matsumoto untuk kemudian dikaitkandengan dengan budaya tradisional Jepang *giri*, *on* dan *wa*, sehingga kita dapat mengetahui sebab dan alasan yang dapat muncul dalam proses pengunduran dirinya. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Ryu Matsumoto dilatar belakangi adanya *haji*. Dimana budaya tradisional Jepang berperan penting dalam mengatur pola kehidupan masyarakat Jepang.

Kata kunci : *Haji*, pengunduran diri, *giri*, *on*, *wa*

Abstract

There are many resignation cases done by Japanese officials. Resignation was done not only by the Prime Minister of, but also by many other ministers. The reasons for resignation are mostly because of 2 issues; personal problems and Japan domestic problems that has direct impact on one's duty. One of the cultural factors that pushes resignation is shame (*haji*) culture. Shame (*haji*) may arise when certain problems become public attention. One of them carried Ryu Matsumoto who resigned from the Ministry of Reconstruction and Disaster Prevention on July 5, 2011. In the case of Ryu Matsumoto resignation, there was an indication that the resignation was against the background of cultural shame (*haji*) in Japanese. Culture of shame (*haji*) itself cannot stand alone in a set pattern of Japanese society. In this study, we will look at how the process of resignation and the political career background of Ryu Matsumoto and tried to relate the concept of *giri*, *on* and *wa* to reveal the factors that cause his resignation as an attempt to avoid *haji*. The result of this study, it was found that the concept of shame (*haji*) also played a role in making process of the decision of Ryu Matsumoto's resignation. And the role of traditional culture here is necessary in order to control the behavior patterns of Japanese society to avoid shame (*haji*).

Keywords: Haji, resignation, giri, on, wa

1. Pendahuluan

Pengunduran diri dari tampuk jabatan dalam pemerintah Jepang banyak terjadi karena adanya beberapa alasan. Salah satu diantara alasan yang muncul adalah adanya konsep budaya tradisional Jepang yang begitu kuat dijaga oleh setiap penduduknya. *Haji* yang merupakan salah satu konsep tradisional bangsa Jepang memegang peran penting mengatur dan mengontrol mekanisme pola kehidupan masyarakat Jepang. Benedict (1982) mengatakan, malu atau *haji* adalah reaksi atas kritik atau pandangan orang lain, dalam masyarakat Jepang menjadi suatu pertimbangan penting dalam menata pola kelakuan (Benedict, 104-106). Dengan kata lain, *haji* merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dalam masyarakat Jepang dan dalam setiap individu masyarakat Jepang sendiri.

Etty Kustianty (1994) mengatakan, konsep *haji* sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kelompok, atau individu satu terhadap individu yang lain. *Haji* dapat muncul ketika ada ketidaklaziman atau penyimpangan (1994 : 4). Jadi jika muncul diantara sebuah hubungan individu dengan individu lain maka dapat dikatakan merupakan sebuah budaya yang cenderung bertindak karena melihat orang lain, untuk tidak memunculkan sebuah pandangan dan reaksi kritik dari pihak lain. Sehingga cenderung tidak bertindak atas keyakinan sendiri dan lebih kepada tindakan yang mengikuti orang lain.

Di sisi lain sebagaimana sebuah budaya itu muncul dan tumbuh, selalu tidak terlepas dengan adanya konsep budaya yang lain. Hal ini berlaku pula bagi

konsep budaya *haji*, didalamnya banyak alasan yang dimunculkan konsep budaya tradisional Jepang lain, diantaranya *giri*, *on* dan *wa*. Yaitu, *haji* dapat muncul jika tidak terpenuhinya *giri*, *on* dan *wa*.

Dengan mencoba menghubungkan konsep budaya *haji* dengan pengunduran diri pejabat Jepang, merupakan penjelasan mengenai betapa pentingnya konsep *haji* mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Jepang. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan Departemen Pendidikan Nasional, pengunduran diri berarti proses atau cara, perbuatan mengundurkan diri, penarikan diri seseorang secara tetap dari pekerjaan negara di bidang sipil, militer dan sebagainya yang dikarenakan lanjut usia, ketidakmampuan dan sebagainya (200: 1264).

Salah satu pengunduran diri yang terjadi di Jepang adalah pengunduran diri Menteri Rekonstruksi dari salah satu kabinet Perdana Menteri Naoto Kan pada tanggal 5 Juli 2011, Ryu Matsumoto (Asahi.com, 2011) Matsumoto memulai karir politiknya pada tahun 1980 melalui ayahnya, Eiichi Matsumoto bersama *Shamin-tou*, tetapi ia baru resmi masuk dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah Fukuoka pada tahun 1990. Berada di *Shamin-tou* hingga tahun 1996, Matsumoto menarik diri dari keanggotaan Partai Sosialis Jepang dan bergabung dengan Partai Demokrat Jepang (*Minshu-tou*). Bersama Yukio Hatoyama dan Naoto Kan, mereka bersama bergerak dalam Partai Demokrat Jepang dan berhasil terpilih dalam pemilihan umum anggota Parlemen Jepang (DIET) pada tahun 1996. Ia terpilih sebagai anggota Parlemen Jepang ke-lima kali secara berturut-turut pada pemilihan umum tahun 2009. Selama

rentang waktu tersebut Ryu Matsumoto juga pernah mengisi pos-pos penting dalam jajaran pemerintah Jepang, diantaranya menjabat ketua Komite Majelis Nasional Khusus pada tahun 1996. Pada tahun 1997-2000 sebagai anggota Dewan Direksi Komite Perdagangan dan Perindustrian, sampai menjadi ketua Komite Dagang dan Lingkungan. Pada tanggal 27 Juni 2011 diangkat menjadi Menteri Rekonstruksi pada kabinet Kan.

Menteri Rekonstruksi Ryu Matsumoto mengambil keputusan pengunduran dirinya setelah mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat dan pihak partai oposisi. Kritikan tersebut mengacu kepada kemunculan pernyataan dan tindakan Ryu Matsumoto ketika melakukan kunjungan kerja ke daerah bencana gempa dan tsunami yang melanda Jepang. Bencana gempa dan tsunami Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 menyisakan kerusakan di tiga daerah terdampak bencana (Iwate, Miyagi dan Fukushima). Kunjungan tersebut rencananya untuk membahas proses pembangunan kembali di tiga titik daerah bencana.

Kunjungan ke Iwate dan Miyagi menyisakan permasalahan dengan pemerintah daerah dan masyarakat yang tertimpa bencana. Kepada Gubernur Iwate Takuya Tasso saat kunjungan tanggal 3 Juli, Ryu Matsumoto mengancam tidak akan membantu proses rekonstruksi pasca bencana jika pemerintah daerah tidak memiliki ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini pula yang muncul saat pertemuan Ryu Matsumoto dengan Gubernur Miyagi, Yoshiro Murai. Pernyataan ini mengundang reaksi masyarakat yang menganggap bahwa

Ryu Matsumoto tidak dapat memahami perasaan masyarakat yang tertimpa bencana. Lebih parah Ryu Matsumoto enggan untuk berjabat tangan dengan Yoshiro Murai yang datang terlambat dalam pertemuan. Matsumoto tidak menghiraukan uluran tangan dari Murai dengan alih-alih mempersilahkan Murai untuk duduk.

Setelah itu saat kunjungannya ke Fukushima untuk memantau keadaan pasca meledaknya reaktor nuklir pembangkit listrik di Fukushima, sekali lagi Ryu Matsumoto mengeluarkan pernyataan yang menurut masyarakat dan pihak oposisi sebagai sesuatu yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintah. Apalagi seorang Menteri Rekonstruksi yang bertugas untuk membenahi dan membangun kembali sarana yang rusak akibat bencana gempa dan tsunami.

Ketika itu keadaan Fukushima yang hancur terserang gelombang tsunami ditambah meledaknya generator pembangkit listrik nuklir menyebabkan penduduk mengungsi dan belum tersentuh upaya rekonstruksi. Mengenai keadaan tersebut Matsumoto berkomentar bahwa ia telah melihat neraka di Fukushima dan mengenai keadaan tersebut juga menyebut Fukushima sebagai kota mati. Dengan munculnya beberapa *statement* dan tindakan Ryu Matsumoto ini, masyarakat Jepang gusar dan mengakibatkan munculnya gelombang kritik dari masyarakat dan pihak partai oposisi (*JIEF Japan Economic Monthly*, Juni-September 2011).

Melihat latar belakang karir Ryu Matsumoto, masyarakat merasa bahwa pernyataan dan tindakan yang muncul

dari Matsumoto saat kunjungan kerja ke wilayah bencana dianggap tidak pantas. Latar belakang keluarga Matsumoto yaitu Jiichiro (kakek) dan Eiichi Matsuoto (ayah) juga merupakan beberapa orang tokoh partai dan pemerintah dari *Shamin-tou* (Partai Sosialis Jepang).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *Haji* (malu) dengan keputusan pengunduran diri pejabat Negara di Jepang sebagai sebuah studi kasus pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Ryu Matsumoto. Penelitian ini juga untuk mengetahui kaitan konsep *haji* dengan konsep-konsep lain dalam masyarakat Jepang, yaitu konsep *wa*, *on*, dan *giri*.

Konsep *wa* dijelaskan dalam buku *Zen and Japanese Culture* yang berarti serasi atau harmonis. Berdasarkan konsep pemikiran dalam Zen, Sen no Rikyu (1522-1591), *wa* berarti keserasian atau keharmonisan, keserasian diantara sesama manusia, antar manusia dengan alam. Menurut konsep *wa* seseorang tidak akan bertindak pura-pura, tidak menunjukkan emosi dan tidak akan lupa sikap kerendahan hati.

On diartikan sebagai “hutang budi” kewajiban atau kemurahan hati. Seseorang dianggap menerima *on* apabila ia menerima anugerah, pemberian dan kemurahan hati. Konsep *on* ini memiliki sifat hierarkis dimana pemberi dan penerima *on* bukanlah individu-individu yang memiliki kedudukan sederajat. Pemberi *on* selalu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada yang menerima *on*. *On* adalah utang dan harus dibayar kembali; tetapi di Jepang, semua pembayaran kembali dianggap berada dalam kategori lain. Untuk bangsa Jepang, rasa berutang yang utama dan yang selalu ada, yaitu *on*, berbeda sekali dengan

pembayaran kembali secara aktif dan ketat yang disebut-sebut dalam serentetan konsep-konsep lain. Rasa berutang seseorang terhadap *on* bukan merupakan kebajikan; pembayaran kembali itulah yang dianggap sebagai kebajikan. Kebajikan dimulai pada saat orang itu memusatkan dirinya secara aktif untuk menebus utang itu (Benedict, 1979: 121).

Giri adalah hubungan kemanusiaan. Menurut Benedict dalam buku *Pedang Samurai dan Bunga Seruni* menjelaskan *Giri* adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, kewajiban yang mau tidak mau, suka maupun tidak suka harus dijalankan. Pada *giri* ini sama sekali tanpa didukung oleh hubungan darah, yang ada adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat atau pekerjaan. Banyak dalam hubungan politik atau pekerjaan. *Giri* tidak mengijinkan untuk mendahulukan kepentingan pribadinya, akan sangat tercela dan aib kalau dia meninggalkan kewajibannya untuk mendahulukan kepentingan pribadinya. *Giri* mengikatnya ke dalam tanggung jawab dengan menekan dirinya sendiri.

Ruth Benedict (1928 : 141) membagi *giri* ke dalam dua bagian yang jelas, yaitu 1). *Giri* kepada dunia, arti harfiahnya “membayar kembali *giri*”- adalah kewajiban seseorang untuk membayar *on* kepada sesamanya, 2) *Giri* kepada nama, adalah kewajiban untuk tetap menjaga kebersihan nama serta reputasi seseorang dari noda fitnah.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia

dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri (Usman dan Setiady Akbar, 2009 : 78). Dalam pengumpulan data sebagai penunjang penulisan skripsi ini, digunakan metode studi pustaka untuk mencari informasi yang mendalam tentang konsep *haji* serta hubungannya dengan pengunduran diri pejabat pemerintahan Jepang, serta kaitannya dengan konsep *wa*, *on* dan *giri*. Pustaka yang digunakan adalah buku, skripsi dan tesis yang telah ada sebelumnya serta surat kabar sebagai pendukung pencarian informasi tentang pengunduran diri yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Jepang dalam studi kasus pengunduran diri Menteri Rekonstruksi Ryu Matsumoto.

3. Hasil dan Pembahasan

Kaitan *haji* dengan pengunduran diri. Keterkaitan konsep-konsep budaya tradisional Jepang untuk mendukung munculnya sebuah perasaan malu (*haji*) menjadikan sebuah pandangan bahwa *haji* merupakan inti dari sebuah upaya untuk mengatur pola kehidupan masyarakat Jepang. Untuk menciptakan sebuah kehidupan yang seimbang pada diri, masyarakat Jepang selalu memandang *haji* sebagai sekat yang transparan namun begitu kuat mengikat tiap individu masyarakat Jepang

Benedict (1982: 104-106) menjelaskan bahwa *haji* merupakan reaksi atas kritik atau pandangan orang lain, dan di dalam tatanan masyarakat Jepang menjadi suatu pertimbangan yang penting dalam menata pola kelakuan. Ditambahkan oleh Robert Priest (2010), malu (*haji*) ditimbulkan dari orientasi sosial budaya dalam kaitannya dengan perefleksian diri dari evaluasi atau pandangan negatif, yaitu

kegagalan untuk mengikuti norma masyarakat.

Dari sini pula dapat diambil kesimpulan dan dapat dimengerti bahwa rasa malu (*haji*) serta rasa bersalah yang paling besar dalam masyarakat Jepang bukanlah perasaan takut kepada Tuhan atau *Kami*, melainkan lebih ditekankan kepada upaya untuk menghindari perasaan malu (*haji*) dari masyarakat umum. Tuhan atau *Kami* menurut masyarakat Jepang hanyalah sebuah simbol dari obyek penyembahan bagi masyarakat Jepang.

Kasus pengunduran diri yang dilakukan Ryu Matsumoto memiliki kaitan dengan pernyataan Benedict, Tsukishima Kenzo dan Yoda Atara tentang budaya malu di Jepang. Pandangan masyarakat Jepang terhadap beberapa tindakan dan ucapan Matsumoto yang menuai banyak kritikan sekaligus mendapat banyak pertentangan. Beberapa reaksi masyarakat yang muncul merupakan salah satu bentuk dari sanksi masyarakat Jepang terhadap ketidaksesuaian yang terjadi. Hal ini dapat muncul karena tindakan dan ucapan Matsumoto menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh orang lain khususnya korban bencana gempa dan tsunami yang melanda daerah timur Jepang .

Selain itu dalam memahami tindakan dan ucapan Matsumoto yang keras dan menyakitkan tersebut juga mengindikasikan bahwa Matsumoto telah gagal dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Dan kegagalan ini pula yang dapat menyebabkan perasaan malu (*haji*) dalam diri seseorang. Karena dalam sebuah nilai tatanan budaya Jepang, terutama untuk menghindari *haji* juga terdapat sebuah unsur kesungguhan (*makoto*) dalam setiap tindakan dan usaha.

Dengan adanya beberapa alasan tersebut dapat memunculkan perasaan malu (*haji*) dari dalam diri Matsumoto setelah adanya reaksi kritik dan tekanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena reaksi dan kritik muncul dari pandangan masyarakat Jepang yang menganggap bahwa ucapan dan tindakan Matsumoto mengenai daerah bencana dan para korban dianggap tidak pada tempatnya. *Liputan 6.com* menuliskan, Ryu Matsumoto seharusnya malu telah mengeluarkan pernyataan tidak simpatik kepada rakyat di saat masyarakat tengah bahu-membahu membangun kembali Jepang. Pernyataan tersebut dinilai tidak simpatik terhadap para korban bencana alam gempa dan tsunami yang sedang menderita.

Selain itu berdasarkan pemikiran Nakane yang menjelaskan keberadaan konsep *haji* berdasarkan tatanan vertikal (*tate shakai*) yang dianut Jepang, ucapan dan tindakan Matsumoto dalam menanggapi persoalan bencana merupakan sebuah penyimpangan. “Seseorang harus tahu tempat atau kerangka dimana dia berada, dan memperhatikan tindakan serta pola kelakuannya. Orang harus bertindak sesuai dengan kedudukan dan peranannya” (Nakane, 1961 : 33-50). Kedudukan Ryu Matsumoto sebagai seorang pejabat dianggap tidak dapat mengayomi dan menjaga sikap yang baik terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Dan hal itu merupakan sebuah pelanggaran dalam pola tatanan masyarakat Jepang. Pelanggaran dan penyimpangan nilai-nilai standar moral yang dianut masyarakat Jepang inilah yang dapat menimbulkan *haji*. Sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas, kemunculan *haji* dikarenakan adanya kekhawatiran atas celaan masyarakat

umum atau orang lain terhadap penyimpangan yang dilakukan.

Malu (*haji*) yang melatarbelakangi pengunduran diri Ryu Matsumoto hanya terbatas kepada malu karena adanya kritik (*kokai*). Hal ini tidak terlepas dari sudut pandang dan kritikan yang muncul dari masyarakat terhadap kinerja Ryu Matsumoto. Kesalahan-kesalahan dan tindakan yang dilakukan Ryu Matsumoto telah memunculkan kritik dari masyarakat yang menyebabkan *kokai* itu muncul.

Dari sini dapat dihubungkan kembali dengan konsep harmoni masyarakat Jepang (*wa*) yang menekankan pada keseimbangan. Keseimbangan dalam pola tatanan masyarakat Jepang begitu dijaga dan dijunjung untuk menghindari konflik yang kemungkinan dapat timbul. Menurut Sen no Rikyu (1522-1591) *wa* berarti keserasian atau keharmonisan. Keserasian yang dimaksud meliputi keserasian di dalam diri sendiri, keserasian diantara sesama manusia, serta keserasian antara manusia dan alam atau lingkungan (*Zen and Japanese Culture* : 1997). Menurut pemikiran Zen ini, konsep *wa* bersifat mengikat dan menjadikan seseorang tidak akan bertindak pura-pura, tidak menunjukkan emosi dan tidak akan lupa dengan sikap kerendahan hati.

Pernyataan yang menyakiti hati masyarakat tersebut mencerminkan Matsumoto tidak dapat menjaga keselarasan dalam dirinya dengan menunjukkan emosinya. Dengan begitu Ryu Matsumoto telah melupakan ajaran tentang nilai *wa* yang begitu penting di Jepang untuk menghindari *haji* yang akan muncul. Karena konsep *wa* berhubungan dengan keserasian yang harus dijaga

dalam diri dan masyarakat telah gugur dengan munculnya respon masyarakat terhadap Matsumoto.

Kaitan pengunduran diri dengan *wa*.

Munculnya reaksi masyarakat menimbulkan konflik yang terjadi dalam diri Matsumoto sendiri serta konflik dalam hubungan masyarakat dengan dia sebagai pejabat pemerintah. Banyak yang mengecam tindakan dan ucapan Matsumoto saat melakukan kunjungan ke Iwate dan Miyagi. Dengan adanya reaksi dan pandangan buruk masyarakat ini berujung kepada tidak terwujudnya keharmonisan (*wa*) dalam kehidupan bermasyarakat Jepang. Dalam hal ini kritikan dan pandangan masyarakat bisa disebut juga dengan konflik yang secara umum berarti hilangnya suatu hubungan yang harmonis.

Dengan keberadaan konflik dalam masyarakat ini dapat menimbulkan *haji* dalam diri Matsumoto sebagai penyebab dari kemunculan kritikan dan pandangan buruk masyarakat Jepang kepadanya. Sesuai dengan konsepsi *haji* oleh Benedict bahwa malu orang Jepang menekankan pada penilaian oleh masyarakat umum. Jadi pandangan miring dan kritikan yang ditujukan kepada Matsumoto yang merupakan penilaian oleh masyarakat berpotensi menimbulkan *haji* dalam diri Ryu Matsumoto akibat tidak terwujudnya *wa*.

Kaitan pengunduran diri dengan *on*.

Selain itu jika menanggapi kasus yang dihadapi Ryu Matsumoto melalui kacamata konsepsi *on*, juga dapat dikatakan memiliki keterikatan dan merujuk kepada konsep *haji*. Dimana dalam hubungannya dengan pengangkatan seorang Ryu Matsumoto sebagai Menteri Rekonstruksi dan

Penanganan Bencana oleh Perdana Menteri Kan pada 27 Juni 2011 terdapat unsur *on* yang melatar belakangnya.

Perkembangan karir politik bersama *Minshu-you* membawa Matsumoto untuk pertama kalinya terpilih sebagai anggota tetap anggota Dewan Perlemen Jepang (*DIET*) yang berasal dari fraksi DPJ (Partai Demokrat Jepang) Hingga terpilihnya kembali Ryu Matsumoto sebagai anggota *DIET* tujuh kali secara berturut-turut dari naungan partai yang sama. Dengan adanya fakta tersebut, dalam perkembangan karir politik Ryu Matsumoto sangat tergantung dengan kepopuleran Partai Demokrat Jepang (*Minshu-tou*) di mata masyarakat Jepang.

Pengertian konsep tradisional *on* yang diartikan sebagai “hutang budi” kewajiban atau “hutang budi” atas kemurahan hati, sehingga seseorang dianggap menerima *on* apabila ia menerima anugerah, pemberian dan kemurahan hati. Dalam hal ini peran serta Partai DPJ dalam mendukung perkembangan karir politik Ryu Matsumoto adalah sebuah anugerah yang diterimanya. Hal tersebut didukung juga dengan pernyataan, *on* merupakan istilah yang menunjuk kepada hutang psikologis dan sosial yang dikenakan pada seseorang atas penerimaan-penerimaan atau kebaikan yang diteimanya dari pihak lain (Yulyanti Hertesa, 2007 : 3). Secara langsung Matsumoto memperoleh pencitraan dan dukungan yang baik dari DPJ pada masa kampanye pemilihan umum.

Ryu Matsumoto sebagai tokoh politik, dia dituntut untuk bisa melakukan pembayaran kembali atas *on* diatas nama kebajikan. Dari sini dapat diartikan dalam contoh nyata pembayaran kembali *on*

yang diterima Ryu Matsumoto kepada partainya, yaitu Partai DPJ. Pembayaran *on* kepada partai sebagai pemberi anugerah kepadanya dapat dilakukan dengan memberikan yang terbaik dalam mengemban tugasnya sebagai bagian dari pemerintah dan bagian dari keanggotaan dirinya dalam partai. Memberikan yang terbaik kepada negara dan kepada partai, serta dapat menjaga baik nama partai diatas namanya sendiri.

Kenyataannya dalam proses pembayaran *on* oleh Ryu Matsumoto terhadap kebajikan yang diterima dari partai yang menaunginya tidak terwujud. Kewajiban untuk menjaga nama baik partai sebagai bagian dari kewajiban balas budi tidak dapat terpenuhi. Pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai moral *on* mengandung sanksi sosial yang cukup berat. Seseorang yang melalaikan pembayaran kembali *on* yang diterimanya disebut dengan *on shirazu* atau orang yang tidak tahu balas budi. Sebutan *on shirazu* ditujukan bagi seseorang yang melelaikan kewajiban atas *on* yang diterimanya, dan hal itu merupakan sesuatu yang dianggap sangat buruk serta merupakan sebuah penghinaan bagi orang tersebut (Yulyanti Hertessa 2007 : 20).

Dari hal tersebut peluang akan kemunculan *haji* dalam diri Ryu Matsumoto sangatlah besar. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa orang yang tidak dapat membayar *on* dari apa yang telah ia terima dapat disebut dengan orang yang tidak tahu balas budi. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat buruk dan dapat membuat seseorang kehilangan muka dalam tatanan masyarakat Jepang. Dalam sebuah hubungan struktural masyarakat Jepang, perasaan berutang yang besar dalam *on* seringkali

mendorong orang untuk menyerahkan segala-galanya yang ada dalam dirinya dan yang ia miliki sebagai imbalan. Hal ini mengungkapkan betapa berat rasa keterutangan yang ia tanggung dari akibat menerima *on*.

Namun disisi lain, dalam konteks Ryu Matsumoto sebagai tokoh publik, yang terjadi merupakan sebuah kegagalan membayar *on* terhadap masyarakat Fukushima, Iwate atau Miyagi. Ini terjadi karena Ryu Matsumoto pernah bekerja secara langsung sebagai Menteri Lingkungan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan akibat radasi nuklir di Fukushima. Karena Matsumoto telah memperoleh mendapat dukungan dari masyarakat Fukushima dalam menjalankan tugasnya. Hal ini merupakan sebuah anugerah dan kebaikan yang diterima Matsumoto dari masyarakat Fukushima, sehingga diartikan bahwa Matsumoto telah mendapatkan *on* yang harus dibayarkan kembali kepada masyarakat.

Dengan adanya konsep *on* yang gagal untuk dibayarkan kepada partai dan masyarakat inilah yang cenderung membuat Ryu Matsumoto mengambil keputusan pengunduran diri. Pengunduran diri Ryu Matsumoto tidak hanya dilakukan dalam konteks dia sebagai tokoh politik Jepang yaitu menteri dalam susunan kabinet Jepang, serta sebagai seorang anggota politisi parlemen.

Kaitan pengunduran diri dengan *giri*. Selain adanya konsep *wa* dan *on* yang berpotensi memunculkan *haji* dan berakibat mundurnya Ryu Matsumoto sebagai Menteri Rekonstruksi dan Penanganan Bencana Jepang, juga terdapat kaitan antara konsep *haji* dan

konsep budaya tradisional *giri* yang ada didalamnya. Konsepsi dan nilai dalam norma *giri* erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan. Pada zaman Edo (abad ke 17-19) pola kehidupan social masyarakat Jepang lebih ditekankan pada suatu keharusan meskipun tidak sesuai dengan kata hati. Konsep *giri* pada awalnya memiliki arti perasaan berhutang budi, (jurnal UPI, 2000 : 80). *Giri* tidak mengijinkan untuk mendahulukan kepentingan pribadinya dan akan sangat tercela dan aib jika seseorang lebih mendahulukan kepentingan pribadinya. Sehingga konsepsi *giri* mengikat masyarakat Jepang ke dalam sebuah penekanan akan nilai tanggung jawab dengan menekan dirinya sendiri.

Beberapa nilai *giri* yang tidak sesuai dalam diri Ryu Matsumoto ketika menjabat sebagai Menteri Rekonstruksi antara lain pada nilai *giri* yang pertama, yaitu *giri* terhadap dunia. Dalam *giri* terhadap dunia terdapat tiga kewajiban yang harus dijalani, yang pertama adalah sebuah kewajiban terhadap tuan pelindung. Tuan pelindung disini dapat diartikan Perdana Menteri sebagai seseorang yang telah mengangkatnya. Dalam hal ini adalah Perdana Menteri Kan yang mempercayakan Matsumoto sebagai Menteri Rekonstruksi dalam susunan kabinetnya.

Penyimpangan yang kedua yang bersangkutan dengan *giri* terhadap dunia adalah kegagalan Ryu Matsumoto membayar *giri* terhadap rakyat Fukushima serta daerah bencana yang lain. Hal ini apabila dilihat dari *giri* terhadap dunia terdapat sebuah kewajiban orang-orang bukan keluarga karena *on* yang diterima dari mereka. Sesuai dengan kewajiban Ryu Matsumoto sebagai Menteri Rekonstruksi dan Penanganan

Bencana Jepang, Matsumoto tidak dapat bekerja dengan maksimal untuk menemukan pemecahan akibat dari bencana sebagai kewajibannya terhadap rakyat Fukushima, Iwate dan Miyagi. Melainkan memunculkan komentar-komentar pedas dan tindakan yang membuat rakyat yang terkena musibah merasa sakit hati. Kegagalan Matsumoto membayar *giri* yang telah disebutkan di atas besar kemungkinan akan munculnya perasaan *haji* yang mempengaruhi proses pengunduran dirinya. Hal ini berkaitan dengan *haji* Ryu Matsumoto sebagai seorang tokoh publik tidak lagi sebagai seorang politisi.

Setelah terpenuhi syarat untuk munculnya perasaan malu (*haji*) atas apa yang telah dilakukan Ryu Matsumoto, didasari atas beberapa alasan bahwa pengunduran diri Ryu Matsumoto adalah dikarenakan dia tidak dapat memenuhi nilai-nilai dari unsur *giri*, *on* dan *wa* yang dominan menyebabkan munculnya perasaan malu (*haji*). Namun disisi lain, keputusan untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Menteri Rekonstruksi dan Penanganan Bencana Jepang pada tanggal 5 Juli 2011 juga merupakan pelaksanaan dan pemenuhan tanggung jawab atas *giri*. Yaitu unsur dari *giri* yang ke-dua, *giri* terhadap nama baik seseorang.

Dalam pengertian konsepsi *giri* terhadap nama seseorang terdapat unsur dan norma kewajiban untuk membersihkan nama baik dan reputasinya atas kesalahan dan kegagalan yang telah terjadi. Kegagalannya memunculkan komentar-komentar pedas dan tindakan yang telah menyakiti hati masyarakat Jepang dan khususnya masyarakat yang menderita akibat bencana gempa dan tsunami 11 Maret 2011. Dan hal itu Matsumoto

dianggap tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Jadi keputusan pengunduran dirinya tersebut merupakan salah satu upaya dari Ryu Matsumoto untuk tetap mengindahkan nilai sopan santun dan nilai-nilai norma dalam masyarakat yang terdapat dalam kewajiban *giri* terhadap nama seseorang sebagai upaya untuk menghindari *haji*. Hal ini akibat dari kelalaiannya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Rekonstruksi dan Penanganan Bencana ketika mengambil keputusan serta atas keluarnya kata-kata pedas dan tindakannya mengenai daerah bencana yang terjadi saat kunjungannya ke beberapa daerah bencana gempa dan tsunami di wilayah Jepang Timur.

4. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang korelasi konsep *haji* dengan pengunduran diri pejabat pemerintah Jepang, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terdapat adanya konsep *haji* yang mempengaruhi keputusan pengunduran diri pemerintah Jepang dari sebuah studi kasus yang dilakukan terhadap kasus pengunduran diri Menteri Rekonstruksi dan Penanganan Bencana Ryu Matsumoto. Dalam penerapan konsep *haji* dalam kasus pengunduran diri oleh Ryu Matsumoto terdapat kaitan dengan konsep-konsep budaya tradisional Jepang lainnya, yaitu, pertama, berdasarkan kaitan konsep *giri* dan *haji* terdapat indikasi bahwa Ryu Matsumoto tidak dapat mengembalikan *giri* terhadap dunia, yaitu tidak dapat membayarkan *giri*-nya terhadap tuan pelindung, dalam hal ini terhadap Perdana Menteri yang telah mempercayakan posisi Menteri Rekonstruksi untuk diisi oleh Ryu

Matsumoto. Juga sebuah kegagalan untuk membayar *giri* atau kewajibannya terhadap masyarakat Fukushima, Iwate dan Miyagi. Ini berkaitan dengan nilai *giri* yang menyebutkan adanya kewajiban terhadap orang-orang bukan keluarga karena *on* yang diterimanya. Dia dapat diterima di daerah bencana oleh masyarakatnya merupakan sebuah hutang budi bagi Ryu Matsumoto.

Kedua, mendapati kaitan konsep *on* dan *haji* yaitu, Ryu Matsumoto tidak dapat membayarkan *on*-nya terhadap partai dan masyarakat yang memilihnya untuk menduduki kursi di parlemen Jepang. Partai adalah sebuah lembaga yang melatar belakangi Ryu Matsumoto dalam perkembangan karir politiknya, serta masyarakat adalah sebagai pemberi kepercayaan terhadapnya. Hal ini didasari tingkat derajat dalam pola *tate-shakai* bahwa partai dan masyarakat memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Ryu Matsumoto sebagai pemberi *on*.

Ketiga, sehubungan dengan kaitan konsep *on* dan *haji* juga terdapat kenyataan bahwa Ryu Matsumoto tidak dapat memelihara keharmonisan (*wa*) antara dirinya dan masyarakat Jepang. Dengan munculnya kritikan dan reaksi masyarakat terhadap komentar pedas dan tindakan Ryu Matsumoto terhadap pemerintah daerah, menandakan bahwa keharmonisan (*wa*) dalam masyarakat Jepang sendiri tidak terwujud. Dengan adanya ketiga fakta kenyataan di atas, merujuk kepada sebuah kesimpulan bahwa terdapat adanya kaitan konsep *haji* dengan proses pengunduran diri yang dilakukan oleh Ryu Matsumoto.

Namun disisi lain, pengunduran diri Ryu Matsumoto juga telah membayarkan *giri* terhadap nama seseorang, yaitu terhadap namanya. *Giri* ini berhubungan dengan

kewajiban untuk “membersihkan” reputasinya atas penghinaan atau tuduhan atas kegagalan. Serta kewajiban untuk menunjukkan dan mengakui kesalahan atau ketidaktahuannya dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Daftar Pustaka

- Bellah, Robert N. 1992. *Religi Tokugawa*. Jakarta : Karti Sarana dan PT Gramedia Pustaka Utama
- Benedict, Ruth. 1982 . *Pedang Samurai dan Bunga Seruni*. Jakarta : Sinar Harapan
- Chie, Nakane. 1981. *Masyarakat Jepang*. Jakarta : Sinar Harapan
- Davies, Roger. J., Ikeno, Osamu. 2002. *The Japanese Mind*. Boston : Turtle Publishing
- Hardiansyah, Agus. 2008. *Analisis Pengabdian Moral Pilot Kamikaze pada PD II*. Skripsi. Medan : Universitas Sumatera Utara (belum diterbitkan)
- Hertessa, Yulyanti. 2007. Neet dan Hubungannya dengan Nilai-nilai Masyarakat Jepang. Skripsi. Jakarta : Universitas Indonesia (belum diterbitkan)
- Kustianty, Ety. 1994 . Tesis *Budaya Malu (haji no bunka) sebagai Mekanisme Control dalam Bermasyarakat Pada Orang Jepang*”. Jakarta: Universitas Indonesia (belum diterbitkan)
- Lawanda, Ike Iswary. 2008. *Matsuri dan Kebudayaan Korporasi Jepang*. Jakarta: ILUNI Kajian Wilayah Jepang Press.
- Lubis, Mochtar. 1977. *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*. Jakarta: Idayu Press.
- Matsuura, Kenji. 2005. *Kamus Jepang-Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama (Anggota IKAPI)
- Priest, Robert. 2010. *Japanese Shame and Guilt*. Trinity International University
- Situmorang, Hamzon, 2008. *Menoleh Budaya Malu Masyarakat Jepang Untuk Lebih Mengenal Indonesia*. Medan : Universitas Sumatera Utara
- Stockwin J.A.A. dalam Nin Bakdi Sumanto. 1984. *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Sugamo, Rikako. 2011. *Setelah 6 bulan, Fukushima Kota Mati?*, dalam *Japan Indonesia Economic Monthly JIEF*, Jun-Sept, halaman 3-5
- Yomiuri Shinbun. 2011. “Ryu Matsumoto memutuskan untuk mengundurkan diri karena suara para korban”. *Yomiuri Shinbun* 6 Juli, halaman 4
- Yustisia. 1992. *Mengenai Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan Jepang (Suatu Telaah Perbandingan Hukum Tata Negara)*.